

Keselarasan Langkah Konkrit Percepatan Transformasi Digital Indonesia



wantiknas



wantiknas



wantiknas



www.wantiknas.go.id

SUSUNAN KEANGGOTAAN (KEPPRES NO. 1 TAHUN 2014)

Tim Pengarah



Ketua Tim : Presiden RI
Wakil Ketua : Menko Perekonomian
Ketua Harian : Menteri PPN/Kepala Bappenas

Anggota:

Menteri Kominfo
Menteri Pendidikan & Kebudayaan
Menteri Perindustrian
Menteri Kesehatan
Menteri Keuangan
Menteri Riset dan Teknologi
Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Sekretaris Kabinet

Tim Penasihat

Universitas:

- Rektor ITB, Rektor UI, Rektor UGM, Rektor ITS

Operator Telekomunikasi:

- Dirut PT. Telkom, Dirut PT. Indosat, Dirut PT. XL Axiata

Dunia Usaha

- Ketua KADIN, Ketua KII, Ketua KEI

Lainnya:

- Pakar, Praktisi

Tim Mitra

- Stakeholder TIK yang ditetapkan oleh Ketua Harian Pengarah

Tim Pelaksana

Ketua Tim : Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Bappenas*
Sekretaris : Dirjen SDPPI Kemkominfo
Wk Sekretaris : Muhammad Andy Zaky
Wk Sekretaris II : Mira Tayyiba

Anggota:

Pemerintah: Deputi Bid Kord Infra & Peng Wil KemkoPerekonomian; Dirjen Aptika Kemkominfo; Sekjen Kemkes; Sekjen Kemdag; Dirjen Anggaran Kemkeu; Sekretaris Kempan & RB; Sestama Bappenas; Deputi SarPras Bappenas; Kapusintek Kemdikbud, Dir ETI Bappenas; Kabiro Ortala Bappenas;
Asosiasi: Ketua Umum MASTEL, Waka umum bid ICT & Penyiaran KADIN;
Pakar/Praktisi: Sylvia Sumarlin; Indra Utoyo; Hari Sungkari; Garuda Sugardo; Zainal A. Hasibuan; Virano G. Nasution; Ashwin Sasongko Sastrosubroto; Ananyo Wahyu Nugroho

Kelompok Kerja

Tim Sekretariat

Tugas Wantiknas (Keppres 1 tahun 2014)

1



Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten;

2



Melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah **penyelesaian permasalahan strategis** yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

3



Melakukan **koordinasi nasional** dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta memberdayakan masyarakat; dan

4



Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas-kementerian agar efektif dan efisien.

Tugas Wantiknas Baru (Kepmen PPN No.45/2020)

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Keppres 1/2014 juga dilaksanakan dalam rangka Pengembangan Transformasi Digital.

Rekomendasi Percepatan Transformasi Digital

5 LANGKAH **PERCEPAT TRANSFORMASI DIGITAL**

1. "Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet."
2. "Persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran."
3. "Percepat integrasi pusat data nasional."
4. "Siapkan kebutuhan SDM talenta digital."
5. "Yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya."



Presiden Jokowi

Senin, 3 Agustus 2020

Pengembangan Bidang TIK (RAPBN 2021)

Program Strategis

- Penyediaan BTS sebanyak 5,053 lokasi
- Penyediaan kapasitas satelit di 12,377 lokasi layanan publik
- Pembangunan Pusat Data Nasional, Literasi Digital, Transformasi Digital Sektor Strategis, Digital Technopreneur
- Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- Pemutakhiran DTKS, perangkat IT dan Jaringan Komunikasi
- Mendukung digitalisasi pendidikan seperti pengadaan alat TIK dan media pembelajaran



Dianggarkan untuk transformasi digital; efisiensi layanan publik; konsolidasi infrastruktur & layanan Bersama; akses internet 4,000 desa/kelurahan daerah 3T.

Belanja K/L

Kemen Kominfo	Rp14,7 T
Kemensos	Rp1,5 T
Kemenkeu	Rp2,1 T
Kemen ATR/BPN	Rp1,0 T
K/L Lainnya	Rp2,2 T

Rp21,5 T

TKDD

Rp9,0 T

Percepatan Peningkatan Infrastruktur Digital

(Focus Group Discussion Perluasan Akses dan Peningkatan Infrastruktur Digital dan Penyediaan Layanan Internet SDM 13 Agustus 2020)



Meninjau kembali Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi agar dapat disesuaikan dengan keadaan saat ini, sehingga berbagai permasalahan TIK nasional dapat diselesaikan dengan baik serta menunjang percepatan transformasi digital



Adanya penghargaan/award bagi daerah yang mendukung dan kooperatif dalam pengembangan implementasi broadband



Perlu adanya dukungan penetrasi broadband di destinasi super prioritas serta dukungan konektivitas internet di Ibu Kota Negara Baru



Adanya kebijakan insentif untuk mewujudkan harga layanan FBB yang terjangkau



Perlu adanya high level Agreement antara Kementerian Kominfo, Bappenas dan Mendagri terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur broadband



Perlu adanya kajian kelayakan pembiayaan fiberisasi kecamatan dan pemetaan infra existing (GIS)



Adanya Sosialisasi solusi teknis kepada Pemda, serta edukasi terhadap masyarakat tentang internet broadband



Perlu memfasilitasi industri dan pemerintah daerah dalam meningkatkan utilisasi internet broadband

Percepatan Integrasi Pusat Data Nasional

(Focus Group Discussion Percepatan Integrasi Pusat Data Nasional, 25 Agustus 2020)



Perlu disusun peta jalan bagi Instansi Pusat dan Daerah mulai dari berkomunikasi melalui jaringan internet ICANN menuju jaringan Intra Pemerintah



Perlu adanya dukungan dan kebijakan pemerintah bagaimana dunia usaha dapat lebih berkontribusi melalui implementasi dan sekuritas sistem yang baik dalam rangka pemenuhan Pusat Data Nasional



Perlu adanya tinjauan terkait US Cloud ACT, EU GDPR sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap Pusat Data Nasional

Rekomendasi Akselerasi Pertumbuhan SDM Talenta Digital

(Focus Group Discussion SDM Talenta Digital 12 Agustus 2020)



Pemerintah perlu memfasilitasi kolaborasi Industri-Perguruan Tinggi (Center of Excellence)



Perlu adanya pembentukan NGCIO yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan CIO Institusi (kementerian atau lembaga)



Kualitas lembaga sertifikasi nasional TIK perlu ditingkatkan sebagai sarana percepatan SDM Talenta Digital yang certified



Relevansi dan kapasitas SDM Talenta Digital perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan Indonesia dan negara maju

Skema Pendanaan, Pembiayaan dan Regulasi Transformasi Digital

(Focus Group Discussion Skema Pendanaan, Pembiayaan dan Regulasi Transformasi Digital, 4 September 2020)

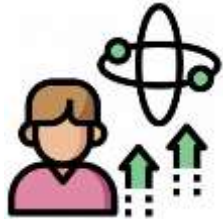


Perlunya disusun kamus transformasi digital sehingga ada panduan dalam tagging belanja/proyek IT di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya Wantiknas mengawal transformasi digital dari sisi



Perlu dipisahkan antara anggaran infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur internet sehingga aliran anggaran belanja negara dalam hal infrastruktur digital dapat diidentifikasi dengan jelas

Rekomendasi Percepatan Transformasi Digital



Diperlukan peran atau lembaga yang dapat melihat secara keseluruhan (**holistic**) terkait pengelolaan sumber daya TIK dalam mengawal transformasi digital, sehingga terjadi alignment antara tujuan negara dan ketersediaan sumber daya TIK yang ada.



Peran kunci **Orkestrator Transformasi Digital** diperlukan untuk memberikan arahan strategis dan mengkonsolidasikan strategi dan inisiatif transformasi digital nasional serta berkolaborasi dengan berbagai stakeholders



Integrasi Pusat Data Nasional (PDN) harus dipercepat untuk memberikan kemudahan bagi Instansi Pemerintah dalam keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan dan pemulihan data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama PDN.



Perlunya adanya **Empowering** peran Wantiknas sesuai dengan Keppres No. 1 tahun 2014 dan Kepmen PPN/Bappenas No. 45/2020 terkait tugas dan fungsi **melakukan koordinasi nasional** dan **memberikan persetujuan** atas pelaksanaan program pengembangan TIK yang bersifat **lintas kementerian** dalam rangka pembangunan transformasi digital



Mengoptimalkan pertemuan tripartit bidang TIK antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka **mengkonsolidasikan berbagai perencanaan, strategi, inisiatif, anggaran TIK** yang bersifat lintas kementerian terkait agenda transformasi di berbagai sektor untuk menyelaraskan agenda transformasi digital nasional

Langkah Konkrit Percepatan Transformasi Digital



Tujuan Strategis Transformasi Digital

Tujuan dan Sasaran

“Transformasi Digital untuk keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang adil, serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan”



**Mengubah
Layanan Publik**



**Melibatkan
Masyarakat**



**Optimalisasi
Ekosistem Bisnis**



**Memberdayakan
SDM**

Terima Kasih



Silakan diunduh di www.wantiknas.go.id



www.wantiknas.go.id



sekretariat@wantiknas.go.id



www.facebook.com/wantiknas



@wantiknas



Wantiknas



Wantiknas



Gedung Jasindo
Jl. Menteng Raya No. 21 Graha Jasindo
MR21 Lt. 6, Kebon Sirih, Menteng,
Jakarta Pusat